

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Australia, resminya Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil, dan hak-hak politik (worldaudit.org, 2015). Australia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G-20 ekonomi utama, Negara-Negara Persemakmuran, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

Migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain telah menjadi fenomena kompleks yang turut menyumbang peran yang signifikan terhadap perubahan demografi suatu negara (Demuth, 2000, hal. 21). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan populasi sebesar 45% yang terjadi di wilayah dunia yang lebih berkembang yang disebabkan oleh migrasi internasional selama kurun waktu 1990-1995 (Demuth, 2000, hal. 23).

Motif migrasi internasional selama ini disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau *push*

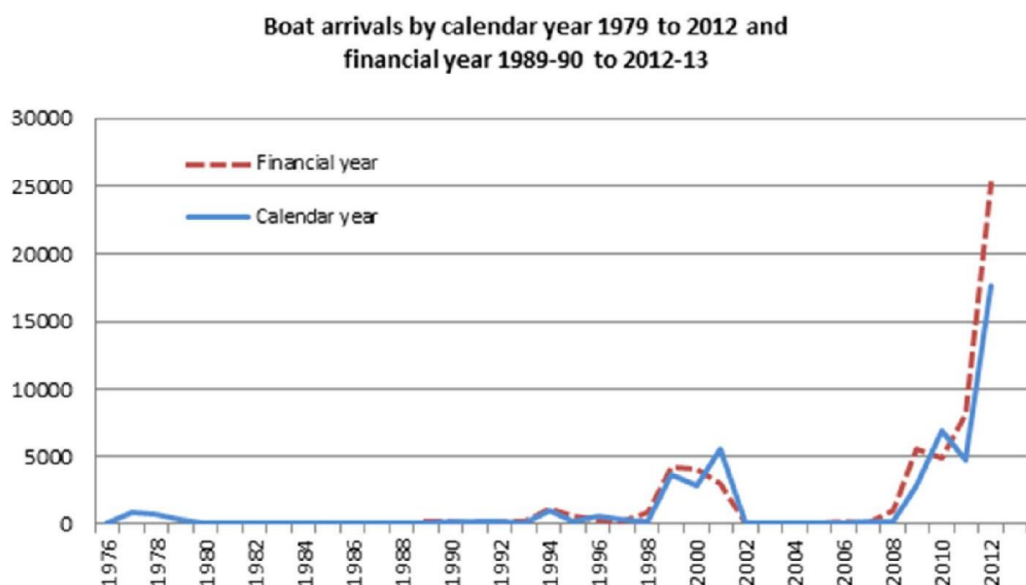
factor seperti perang, diskriminasi, maupun bencana alam kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau *pull factor* yang kemudian memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik (www.worldsavvy.org, 2015). Adapun negara tujuan dari warga negara yang melakukan migrasi internasional, baik yang disebabkan oleh *push factor* maupun *pull factor*, sebagian besar adalah negara yang mempunyai daya tarik di bidang keberhasilan ekonomi, kesejahteraan sosial maupun kestabilan politik seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, serta Selandia Baru.

Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Terminologi *boat people* sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau asylum seeker yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada di luar teritori negara tersebut.

Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC) memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal atau *illegal immigrant* (www.immi.gov.au, 2015). Persoalan imigran ilegal yang terus terjadi sangat meresahkan bagi Australia, karena peningkatan terus terjadi dari tahun ke tahun khususnya imigran ilegal atau pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia dengan menggunakan perahu.

Berdasarkan data Badan Pengungsi Australia, pada tahun 2004-2005 terdapat 8 perahu dengan 61 imigran. Pada 2008-2009 mulai meningkat menjadi 23 perahu dengan 985 imigran. Pada 2009-2010 ada 117 perahu dengan 4.370 imigran dan 2010-2012 sebanyak 110 perahu dengan 7.983 imigran dan pada tahun 2012-2013 terdapat sebanyak 403 perahu dengan jumlah 25.173 imigran (Phillips & Spinks, Boat arrivals in Australia since 1976, 2011).

Tabel 1. Grafik Kedatangan Orang yang Tiba secara Ilegal dengan Perahu pada Tahun 1979-2013



*Sumber: Parliament of Australian: Department of Parliamentary Services.
Statistical Appendix updated 23 July 2013. Page 26.*

Persoalan imigran yang saat ini terus meningkat dan membutuhkan perhatian serius dan harus menjadi prioritas utama negara mengatasinya, karena tidak sedikit para imigran ilegal melakukan perjalanan laut dari Indonesia ke Australia dengan menggunakan perahu dimana Indonesia menjadi negara transit para imigran ilegal karena letak Indonesia merupakan negara kepulauan dan bertetangga dengan Australia sangat strategis jika dilalui dengan jalur laut (nasional.vivanews.com, 2009). Bagi Australia kehadiran pencari suaka yang terus meningkat tersebut menjadi beban tersendiri bagi kedaulatan serta keamanan di Australia.

Dengan meningkatnya jumlah migrasi maka risiko munculnya penyeludupan orang pun semakin besar. Penyeludupan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang saat ini marak terjadi (Soesilowati, 2011). Pemerintah Australia menganggap masalah penyelundupan manusia lewat laut ke wilayahnya adalah hal yang menyangkut kedaulatan. Beberapa alasan yang menggambarkan penyeludupan manusia sebagai ancaman utama bagi masyarakat Australia, yaitu antara lain :

1. Adanya persoalan serius terhadap keamanan dan keprihatinan akan adanya tindak kriminal ketika orang-orang yang datang ke Australia tetapi tidak memiliki identifikasi yang jelas.
2. Terdapat risiko karantina terhadap pemeriksaan kesehatan bagi warga biasa yang akan melewati proses imigrasi.

3. Pemrosesan terhadap imigran ilegal menimbulkan masalah biaya dan logistik yang signifikan.
4. Penyeludupan manusia dapat melanggar kedaulatan Australia, sehingga mengganggu kedaulatan negara dalam mengontrol perbatasan negaranya (www.afp.gov.au, 2015).

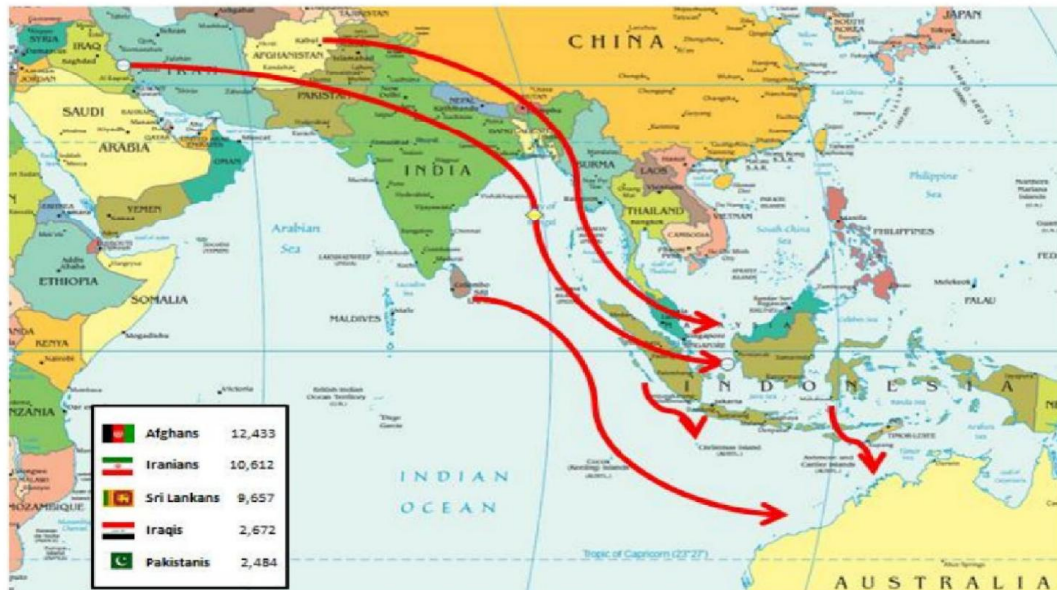
Persoalan imigran yang saat ini terus meningkat membutuhkan perhatian serius dan harus menjadi prioritas utama negara mengatasinya. Berbagai kebijakan pun sudah diterapkan dengan tujuan agar dapat mengontrol arus kedatangan imigran ilegal pencari suaka yang datang melalui jalur laut.

Pada masa pemerintahan perdana menteri John Howard, Australia menerapkan kebijakan *Pasifik Solution*, *Operasi Relex*, pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi. Pemerintahan perdana menteri Kevin Rudd sepenuhnya memberdayakan keberadaan pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas dan memberikan visa permanen. Pada pemerintahan perdana menteri Julia Gillard pemerintah mengumumkan bahwa pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru akan dibuka kembali, pemrosesan imigrasi untuk visa perlindungan akan tertunda untuk jangka waktu sekitar 4-5 tahun (www.amnesty.org, 2013).

Meskipun telah diterapkan beberapa kebijakan tersebut belum juga mampu untuk menangani persoalan peningkatan kedatangan para pencari suaka di Australia. Larangan dan sanksi keras yang diterapkan Australia sebagai negara tujuan seperti tidak diperdulikan. Hal ini terbukti dengan jumlah kapal ilegal imigran ilegal dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia yang terus

meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, imigran ilegal dari negara Timur Tengah seperti Iran, Afganistan dan Pakistan masih terus mengalir (www.nationals.org.au, 2013).

Gambar 1. Labor's Record: 48.300 Kapal Ilegal yang Tiba sejak Tahun 2007



Sumber : The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama satu setengah tahun terakhir, tidak kurang dari 19 ribu imigran ilegal tiba di Australia. Oleh karena itu, perdana menteri terpilih tahun 2013 lalu juga berupaya untuk mengatasi masalah ini. Dia adalah perdana menteri Tony Abbott yang menjabat mulai menjabat pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2015. Tony Abbott tidak dapat menyelesaikan fenomena manusia perahu begitu saja. Hal ini dikarenakan masalah imigran ilegal telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan. Sehingga

pemerintahan Tony Abbott harus membuat kebijakan atau *policy* guna mengatasi *illegal immigrant* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, banyak sekali jumlah imigran ilegal atau *illegal immigrant* yang masuk ke negara Australia dan membuat pemerintahan Tony Abbott berusaha untuk mengatasi hal tersebut melalui suatu kebijakan. Jadi, pertanyaan yang ingin penulis kemukakan adalah : **“Bagaimana kebijakan Australia dalam mengatasi *illegal immigrant* di bawah pemerintahan PM Tony Abbott?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: mendeskripsikan bagaimana kebijakan Australia dalam mengatasi *illegal immigrant* di bawah pemerintahan PM Tony Abbott, untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima oleh penulis.

Dan tidak kalah pentingnya adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

Sebelum membahas tentang teori maupun konsep yang dipakai dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi operasional dari judul skripsi ini. Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus kita lakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris. Definisi itu mengatakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita amati untuk mendefinisikan fenomena

yang didefinisikan agar mencapai pengalaman indrawi peneliti yang bersangkutan (Mas'ood, 1990).

Kata kunci dari judul skripsi yang penulis pilih adalah kebijakan. Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis (Hornby, 1995). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah, organisasi, dan sebagainya (Alwi, 2007). James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 2010). Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Islamy, 1988).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks judul penelitian ini, maka

yang dimaksud dari kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mengatasi masalah *illegal immigrant*. Sehingga fokus dari penelitian ini adalah segala tindakan yang dilakukan Tony Abbott terkait penyelesaian masalah tersebut.

Setelah mengetahui definisi operasionalnya, penulis akan mengemukakan kerangka dasar teori. Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya akan penulis gunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini.

Moestar Mas'ood menyebutkan bahwa teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis (Mas'ood, 1990, hal. 186).

Dalam penelitian ini kerangka dasar teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) oleh Hans J. Morgenthau dan Teori Pembuatan-Keputusan (*Decision Making Theory*) oleh William D. Coplin.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :
“Tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah,

keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi” (Plano & Olton, 1999). Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri.

Konsep kepentingan nasional merupakan hasil telaah para pemikir realisme. Hans. J Morgenthau menyatakan bahwa : “Politik itu sendiri pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik” (Jackson & Sorensen, 2005, hal. 100). Morgenthau yakin bahwa setiap pemimpin negara merasa wajib melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan pada kepentingan nasional dan pemimpin akan disalahkan apabila gagal mencapainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional diartikan sebagai kelangsungan hidup (*survive*) suatu negara yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kulturalnya dalam dunia internasional (Morgenthau, 2010).

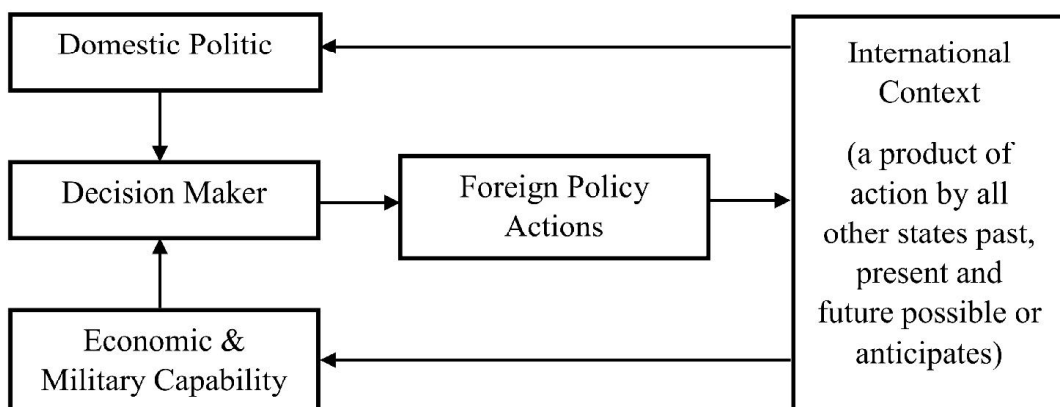
Sebagai negara maju, Australia pastinya mempunyai kepentingan nasional yang ditujukan untuk mensejahterakan perekonomian, pendidikan, dan keamanan di dalam negaranya. Pastinya terdapat berbagai *national interest* dalam upaya mengatasi imigran ilegal. Oleh karena itu konsep kepentingan nasional tidak dapat

dipisahkan dari kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott.

2. Teori Pembuatan-Keputusan (*Decision Making Theory*)

William D. Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua* adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Coplin, 2003, hal. 30). Berikut adalah model teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri :

Tabel 2. Bagan Model Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri oleh William D. Coplin



Sumber : Wiliam de Coplin, "Introductions to International Politic : Teoritical Overview"

a. Kondisi Politik dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “*policy influencer*”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum, dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Teori William D Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara atau dalam bahasan Easton disebut sebagai *input* (Budiardjo, 2008, hal. 77). *Input*

tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legeslatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik.

Dalam konteks mengatasi imigran ilegal di Australia, masyarakat menuntut pemerintah Australia dalam menjaga wilayah perbatasan dari masuknya para pencari suaka. Pemerintahan Tony Abbott tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat guna memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil dapat menguntungkan kondisi politik dalam negeri agar dapat memperkuat legitimasinya. Sehingga harus ada timbal balik antara pemerintah Australia di bawah PM Tony Abbott dengan masyarakat.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja (Coplin, 2003, hal. 112). Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) di mata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya (Winarno, 2011).

Negara Australia adalah negara yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi, terbukti bahwa Negara Australia juga tercatat menduduki peringkat kedua dalam hal Indeks Pembangunan Manusia PBB Tahun 2010 dan menduduki peringkat pertama dalam hal Indeks Kemakmuran yang diterbitkan oleh Legatum pada Tahun 2008. Sebagai salah satu negara maju di dunia, kegiatan ekonomi Australia mengandalkan berbagai bidang usaha, diantaranya adalah bidang pertanian, pertambangan, pariwisata, dan pendidikan. Sedangkan dalam hal kekuatan militer, Australia sudah cukup mumpuni jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Australia di bawah Tony Abbott mempunyai 56.200 personel militer dengan cadangan 28.550 personel yang mana militer Australia sudah dipersenjatai dengan alat persenjataan darat, laut, dan udara yang sudah canggih (news.merahputih.com, 2015).

Karena kekuatan ekonomi dan militer Australia yang tinggi, maka kebijakan luar negeri yang diambil dapat mempengaruhi sikap negara lain khususnya negara-negara di Asia Tenggara.

c. Konteks Internasional

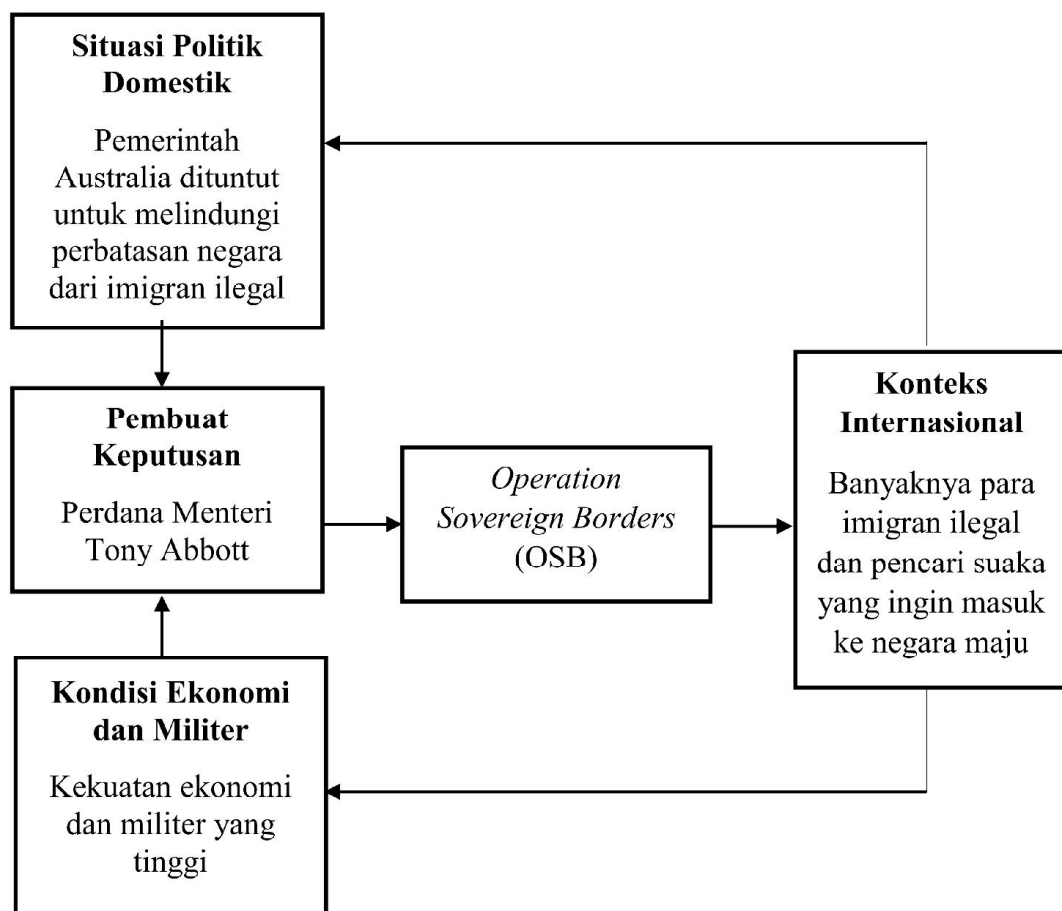
Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif (Coplin, 2003, hal. 166). Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis (Coplin, 2003, hal. 167). Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting. Pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan.

Jika kita hubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka kebijakan Tony Abbott dalam mengatasi masalah tersebut disebabkan oleh banyaknya imigran ilegal dan para pencari suaka yang ingin masuk ke negara-

negara maju guna mendapatkan kesejahteraan. Dampak dari datangnya mereka sangatlah buruk bagi negara tujuan karena populasi akan meningkat sehingga pengangguran pun bertambah. Selain itu kondisi ekonomi akan terganggu dengan meningkatnya jumlah impor produk yang disebabkan permintaan barang tinggi sedangkan produk dalam negeri tidak mencukupi. Dan salah satu negara yang menjadi tujuan para imigran ilegal adalah Australia.

Tabel 3. Variabel Yang Menjelaskan Situasi Dalam Negeri Dan Internasional



Sumber : Aplikasi variable Wiliam de Coplin, "Introductions to International Politic : Teoritical Overview"

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan didukung kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba menarik hipotesa, bahwa :

Dengan adanya pertimbangan berupa : Pertama, konteks internasional yaitu semakin banyaknya imigran ilegal dan pencari suaka yang ingin masuk ke negara maju. Kedua, kondisi ekonomi dan militer Australia yang berkapabilitas tinggi. Ketiga, situasi politik dalam negeri Australia yang mana masyarakat menuntut agar pemerintah Australia melindungi wilayah perbatasan dari datangnya para imigran ilegal dan pencari suaka. Maka, kebijakan Australia dalam mengatasi masalah *illegal immigrant* di bawah pemerintahan PM Tony Abbott adalah dengan melakukan *Operation Sovereign Borders* (OSB) atau Operasi Kedaulatan Perbatasan.

F. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan sistem metodologi yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau dikenal dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan di uji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Metode deskriptif analitis merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, baik media cetak seperti buku, makalah, surat kabar, jurnal dan juga media elektronik seperti internet serta dokumen yang relevan

dengan pembahasan mengenai kebijakan Australia dalam mengatasi *illegal immigrant* di bawah pemerintahan Tony Abbott.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi jangka waktunya, tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2015, dimana dalam kurun waktu tersebut Tony Abbott menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bab yang masing-masing bab membahas hal-hal berbeda untuk memudahkan memahami skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan penggambaran skripsi secara umum yaitu pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan di antaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan mengenai fenomena dari *illegal immigrant*, faktor-faktor penyebabnya dan permasalahan yang ditimbulkan.

Bab III menjelaskan tentang dinamika kebijakan pemerintah Australia dalam mengatasi masalah *illegal immigrant* pada masa pemerintahan John Howard, Kevin Rudd, dan Julia Gillard.

Bab IV penulis menjelaskan tentang pelaksanaan *Operation Sovereign Borders* (OSB) dalam mengatasi masalah *illegal immigrant* di Australia.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini.